

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang mempunyai pandangan khusus tentang perekonomian negaranya. Pandangan tentang perekonomian Indonesia termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”**. Lembaga atau badan perekonomian yang paling sesuai dengan maksud pasal 33 ayat 1 tersebut adalah koperasi.

Koperasi diharapkan untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berasaskan kekeluargaan. Asas kekeluargaan menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan perekonomian, mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang, dan bertujuan dalam rangka memberikan jalan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha yang berbasis kemasyarakatan.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menyebutkan bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya suatu koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota yang merupakan prioritas utama koperasi, kesejahteraan anggota yang dimaksud bisa dalam bentuk peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan, efisiensi harga atau lebih dikenal dengan manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung. Selain memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan yang dapat disediakan oleh koperasi.

Pada saat ini di Indonesia koperasi terbagi kedalam beberapa jenis koperasi, Menurut Firdaus dan Susanto (2004 : 62) membagi menjadi dua jenis koperasi yang pertama jenis koperasi berdasarkan kebutuhan dan efisiensi ekonomi dan yang kedua jenis koperasi khusus golongan fungsional.

Koperasi fungsional merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai atau karyawan suatu instansi tertentu, salah satu koperasi fungsional diantaranya merupakan Koperasi Primer khusus untuk Tentara Nasional Indonesia yang berada di Asrama Yon Arhanudri-3 Siliwangi yaitu Koperasi Kartika Kelelawar yang terbentuk pada tanggal 1 november 1964 dan telah berbadan hukum NO. 3709/BH/DK-10/1 pada tanggal 17 Oktober 1980. Anggota Primkop kartika Kelelawar adalah para anggota TNI Angkatan Darat yang berada di wilayah Primkopad Yonarhanudri – 3 Dam III/SLW. Selama 5 tahun terakhir anggota Primkop Kartika Kelelawar tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2018 anggota Primkop kartika kelelawar sebanyak 504 orang militer. (Sumber Laporan Keuangan Primkop Kartika Kelelawar Tahun Buku 2014-2018).

Tabel 1. 1 Data Anggota Koperasi Kartika Kelelawar berdasarkan Jabatan di satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

| Data Anggota Tahun 2018 | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Jabatan | Jumlah (Orang) |
| Pamen | 2 |
| Pama | 18 |
| Bintara | 125 |
| Tamtama | 359 |
| Total | 504 |

Sumber : Laporan RAT Koperasi Kartika Kelelawar Tahun 2014-2018

Primkop Kartika Kelelawar dalam pelaksanaannya memiliki dua unit usaha yaitu Unit Pelayanan dan Unit Simpan Pinjam. Dalam pelaksanaan aktivitas usahanya kedua unit usaha tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Unit pelayanan, merupakan bidang usaha yang memenuhi pengadaan barang-barang untuk keperluan sehari-hari, baik berupa barang primer/sandang dan sekunder pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi bersama dengan keluarganya. Bidang usaha primer meliputi penjualan toko (waserda) dan air isi ulang. Bidang usaha sekunder meliputi peralatan-peralatan elektronik yang dibutuhkan anggota seperti Televisi, *Handphone*, dan jam tangan. Yang terakhir bidang usaha sandang meliputi kebutuhan peralatan dan perlengkapan tentara.
2. Unit Simpan Pinjam, bidang usaha ini bergerak pada kegiatan usaha simpan dan pinjam anggota ke koperasi.

Agar usaha koperasi mampu bersaing dengan badan usaha lain atau pelaku ekonomi lainnya, maka koperasi harus meningkatkan kemampuan dalam hal manajemen yang salah satunya yaitu manajemen keuangan. Keuangan merupakan salah satu fungsi yang penting dalam perusahaan koperasi. Manajemen keuangan memiliki aktivitas dalam penggunaan dana, perolehan dana dan pengelolaan dana agar dapat ter alokasi secara efektif dan efisien, sehingga kegiatan operasi koperasi dapat berjalan dengan lancar dan kebutuhan ekonomi anggota terpenuhi.

Dengan meningkatkan kemampuan manajemen keuangan, koperasi dapat membuat laporan keuangan yang mudah dibaca dan dimengerti sebagai bentuk transparansi kepada anggota dari aktivitas usaha yang dijalankan. Dalam praktiknya laporan keuangan tidak dibuat secara seenaknya, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan koperasi sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang) serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki.

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan koperasi dalam satu periode yang dituangkan dalam bentuk angka-angka. Untuk melihat kondisi keuangan koperasi perlu membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan, untuk melihat posisi keuangan koperasi serta kinerja keuangan koperasi selama satu periode. Perbandingan ini disebut dengan analisis rasio keuangan, salah satu rasio keuangan yang sering digunakan yaitu rasio likuiditas

untuk melihat kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas koperasi harus sesuai dengan standar yang berlaku agar tidak terjadi penumpukan persediaan atau banyaknya uang yang beredar diluar atau disebut dengan piutang. Kondisi seperti itu dapat menyebabkan kondisi koperasi kurang sehat, karena pengelolaan yang kurang baik dari sisi piutang dan persediaan, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan manajemen piutang agar piutang koperasi lebih terkontrol.

Likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih (Munawir, 2014 : 31). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas yaitu *current ratio* dimana rasio ini membandingkan antar aktiva lancar dengan hutang lancar. Terdapat dua hasil dalam penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maka dikatakan koperasi dalam keadaan *illikuid*. Sebaliknya apabila perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut maka dapat dikatakan koperasi dalam keadaan *likuid*.

Over likuid adalah keadaan dimana koperasi memiliki kelebihan dana artinya jumlah dana tunai dan dana yang dapat dicairkan melimpah. Kejadian ini juga kurang baik karena ada aktivitas yang tidak dilakukan secara optimal. Manajemen kurang mampu menjalankan kegiatan operasional dengan baik, terutama dalam hal menggunakan dana yang dimiliki. Sudah pasti hal ini akan berpengaruh terhadap usaha pencapaian laba seperti yang diinginkan (Kasmir, 2016

: 129). Kondisi likuiditas koperasi dalam keadaan sehat atau tidak dapat diketahui melalui kriteria penilaian menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.06/Per/M.KUKM/V/2006, dimana kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Penilaian Standar Likuiditas Koperasi

| Data Penilaian Likuiditas | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Kriteria | Interval |
| Sehat | 200% s/d 250% |
| Cukup Sehat | 175% s/d <200% atau >250% s/d 275% |
| Kurang Sehat | 150% s/d <175% atau >275% s/d 300% |
| Tidak Sehat | 125% s/d <150% atau >300% s/d 325% |
| Sangat Tidak Sehat | <125% atau >325% |

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 06/Per/M/KUKM/V/2006

Adapun *Current Ratio* yang dimiliki oleh koperasi Kartika Kelelawar selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3 Current Ratio Koperasi Kartika Kelelawar Tahun 2014-2017

| Likuiditas Koperasi | | | |
|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| Tahun | Aktiva Lancar | Hutang Lancar | Likuiditas |
| 2014 | Rp3.749.345.174 | Rp159.996.421 | 2343% |
| 2015 | Rp4.504.234.885 | Rp154.135.652 | 2922% |
| 2016 | Rp4.476.098.694 | Rp177.254.265 | 2525% |
| 2017 | Rp5.272.975.981 | Rp159.468.622 | 3307% |
| 2018 | Rp5.512.240.084 | Rp178.626.636 | 3086% |

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Kartika Kelelawar Tahun 2014-2018

Berdasarkan Tabel 1.2 perkembangan *current ratio* Koperasi Kartika Kelelawar tahun 2014 sampai dengan 2017 berfluktuasi setiap tahunnya. *Current Ratio* sebagai alat ukur likuiditas pada tahun 2017 sebesar 3307%. Jika melihat kriteria menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 06/Per/M/KUKM/V/2006, *Current Ratio* Koperasi Kartika Kelelawar dalam

kondisi tidak sehat karena lebih dari 325% yang artinya *Current Ratio* Koperasi Kartika Kelelawar mengalami *Over Likuid*. *Current Ratio* dikatakan sehat jika memiliki nilai diantara 200% sampai dengan 250%.

Keadaan *Over Likiuid* ini diketahui karena adanya kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar, karena keduanya merupakan dana yang dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Menurut laporan keuangan koperasi pada Neraca keuangan dilihat pada aktiva lancar, piutang koperasi memiliki nilai yang paling besar, artinya piutang memiliki pengaruh yang besar yang mengakibatkan aktiva lancar lebih besar dari pada hutang lancar. Adapun data aktiva lancar dan hutang lancar koperasi dari tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Data Aktiva Lancar Koperasi Kartika Kelelawar

| Data Aktiva Lancar Koperasi Kartika Kelelawar | | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Tahun | Kas | Bank | Piutang Uang | Piutang Barang | Persediaan |
| 2014 | Rp5.000.000 | Rp1.146.902.995 | Rp1.414.420.817 | Rp884.362.367 | Rp286.995.697 |
| 2015 | Rp8.992.800 | Rp704.049.099 | Rp2.630.092.377 | Rp853.727.999 | Rp307.372.610 |
| 2016 | Rp7.603.900 | Rp184.497.867 | Rp1.824.812.887 | Rp2.459.184.040 | Rp158.622.223 |
| 2017 | Rp1.499.500 | Rp255.673.885 | Rp1.690.788.707 | Rp3.072.745.220 | Rp252.268.669 |
| 2018 | Rp5.189.500 | Rp260.237.491 | Rp1.500.186.107 | Rp3.564.526.863 | Rp182.100.123 |

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Kartika Kelelawar Tahun 2014-2018

Tabel 1. 5 Data Hutang Lancar Koperasi Kartika Kelelawar

| Data Hutang Lancar Koperasi | |
|-----------------------------|---------------|
| Tahun | Dana-Dana |
| 2014 | Rp159.996.421 |
| 2015 | Rp154.135.652 |
| 2016 | Rp177.254.265 |
| 2017 | Rp159.468.622 |
| 2018 | Rp178.626.636 |

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Kartika Kelelawar Tahun 2014-2018

Dari data aktiva lancar dan hutang lancar diatas dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya over likuid koperasi di akibatkan karena jumlah Aktiva Lancar yang dimiliki koperasi lebih besar dibandingkan dengan jumlah Hutang Lancar koperasi. Jika diamati lebih detail terlihat jelas pada aktiva lancar koperasi akun yang memiliki nilai yang paling besar yaitu ada pada akun Piutang koperasi, yang artinya koperasi memiliki jumlah uang yang banyak akan tetapi uang tersebut lebih banyak beredar di luar bukan di kas koperasi.

Tabel 1. 6 Data Piutang Koperasi Kartika Kelelawar Tahun 2014-2018

| Data Piutang barang dan Piutang Uang Koperasi | | |
|--|---------------------|-----------------------|
| Tahun | Piutang Uang | Piutang Barang |
| 2014 | Rp1.414.420.817 | Rp884.362.367 |
| 2015 | Rp2.630.092.377 | Rp853.727.999 |
| 2016 | Rp1.824.812.887 | Rp2.459.184.040 |
| 2017 | Rp1.690.788.707 | Rp3.072.745.220 |
| 2018 | Rp1.500.186.107 | Rp3.564.526.863 |

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Kartika Kelelawar Tahun 2014-2018

Dari Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa koperasi memiliki piutang yang sangat besar setiap tahunnya. Diduga kondisi seperti ini di akibatkan karena manajemen piutang koperasi tidak optimal dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan piutang yang lebih baik, agar piutang koperasi dikelola dengan baik. Manajemen piutang ini akan membantu koperasi memastikan bahwa semua piutang dapat ditagih dan menjadi kas yang akan menambah laba koperasi.

Pada unit usaha pelayanan, koperasi Kartika Kelelawar memberikan kebijakan penjualan kredit kepada anggota dengan margin 15% per bulan dengan jangka waktu 10 bulan dengan ketentuan 2%-5% dibayar langsung dan sisanya

dibayar kredit. Barang yang dikerdilkan bermacam-macam oleh pihak koperasi, akan tetapi suku bunga dan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan sama. Untuk unit usaha Simpan Pinjam koperasi memberikan kebijakan apabila anggota meminjam \leq Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan tingkat bunga yaitu 15% dalam jangka waktu 10 bulan, sementara jika uang yang di pinjam \geq Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan maksimal pinjaman yaitu sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) tingkat bunga sebesar 25% dengan jangka waktu 20 bulan. Menurut keterangan pengurus koperasi bunga yang diberikan koperasi untuk kedua unit usaha merupakan kesepakatan bersama dengan anggota ketika melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kebijakan kredit koperasi ini merupakan kebijakan yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis untuk menarik minat pelanggan. Akan tetapi, dengan tidak adanya pengelolaan yang baik mengenai kebijakan ini dapat menimbulkan risiko tidak dapat ditagihnya sebagian atau mungkin seluruh dari piutang tersebut. Menurut (Indriyanto Gitosudarmo dan Basri, 2002 : 81) Piutang adalah merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit.

Melihat fenomena tersebut diduga bahwa terdapat kondisi yang mendukung dilakukannya penelitian untuk Pengendalian Manajemen Piutang Koperasi yang menyeluruh. Pengendalian tersebut bertujuan untuk mengelola piutang koperasi yang lebih baik. Dari fenomena diatas peneliti akan mengambil Unit Usaha Pelayanan sebagai objek penelitian yang dilakukan, karena jika dilihat dari tabel

1.6 piutang koperasi berada lebih besar pada Unit Usaha Pelayanan dalam penjualan barang.

Penelitian mengenai Manajemen Piutang telah dilakukan oleh Vidiana Soraya (2016) dengan judul “Pengaruh Faktor Manajemen Piutang Terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Perusahaan Sub Sektor Properti dan *Real Estate* di BEI”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh positif dari manajemen piutang terhadap likuiditas. Semakin tinggi nilai faktor manajemen piutang, maka semakin tinggi tingkat likuiditas. Sedangkan untuk profitabilitas, manajemen piutang berpengaruh negatif. Yang artinya semakin tinggi nilai faktor manajemen piutang, semakin rendah nilai profitabilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji kembali variabel-variabel yang berpengaruh terhadap likuiditas agar peneliti dapat mengetahui apakah hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu atau tidak, terlebih di Koperasi Kartika Kelelawar memiliki Likuiditas yang berada pada kriteria sangat tidak sehat sesuai dengan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjawab variabel-variabel yang berpengaruh terhadap likuiditas di Koperasi Kartika Kelelawar. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota Koperasi Kartika Kelelawar, dengan adanya perbaikan pada likuiditas koperasi. Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan maka dilakukan penelitian dengan judul “**Peranan Manajemen Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi**”. Di Primkop Kartika Kelelawar Jl. Menado No. 12 Bandung – Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan pada latar belakang dan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Piutang Yang Diterapkan Koperasi Kartika Kelelawar.
2. Bagaimana Tingkat Rasio Likuiditas Pada Koperasi Kartika Kelelawar.
3. Bagaimana Peranan Manajemen Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi Kartika Kelelawar.
4. Apa Tanggapan Anggota Tentang Tingkat Rasio Likuiditas Yang Mengalami *Over Likuid*.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk pengujian variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Likuiditas koperasi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Bagaimana Manajemen Piutang Yang Diterapkan Pada Koperasi Kartika Kelelawar.
2. Mengetahui Bagaimana Tingkat Rasio Likuiditas Koperasi Kartika Kelelawar.
3. Mengetahui Bagaimana Peranan Manajemen Piutang Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi Kartika Kelelawar.

4. Mengetahui Tanggapan Anggota Tentang Tingkat Rasio Likuiditas Yang Mengalami *Over Likuid*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dari hasil-hasil pemikiran secara rasional. Selain itu, sebagai aspek pembanding untuk penelitian selanjutnya khususnya pada penelitian Pengaruh Manajemen Piutang Terhadap Likuiditas dan Dampaknya Kepada Anggota Koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini berguna bagi koperasi sebagai bahan informasi serta bahan masukan untuk para pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan terkait masalah yang diteliti.

IKOPIN